KINERJA APARATUR PEMERINTAHAN KABUPATEN BANDUNG BARAT

(Studi Tentang Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Wilayah Desa Pasirlangu)

Oleh:
Diky Ahmad Fauzy
NIM: 41714015
Skripsi ini dibawah bimbingan:
Tatik Rohmawati, S.IP., M.Si

Abstract

Farmers' welfare is the main task of the West Bandung Regency Government. Issues relating to improving the welfare of swallow farmers in Pasirlangu Village such as, regarding the level of income of farmers who are still low, knowledge and potential of farmers who are not qualified, it is related to the performance that is not optimal in the main tasks that have been determined.
Keywords: Performance, Welfare, Farmers

Abstrak

Kesejahteraan petani menjadi tugas pokok Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat. Persoalan yang berkenaan dengan peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu seperti, mengenai tingkat pendapatan petani yang masih rendah, pengetahuan dan potensi petani yang tidak mumpuni, hal tersebut berkenaan dengan kinerja yang belum optimal dalam tugas pokok yang telah ditentukan.
Kata kunci: Kinerja, Kesejahteraan, Petani

1. PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG MASALAH

Pemerintah dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang baik, bersih dan berwibawa, diharapkan pada pelaksanaan tugas yang sangat luas dan kompleks. Pemerintah memiliki hak dan wewenang untuk mengatur kehidupan warga negaranya. Penyelenggaraan pemerintahan mengemban tiga fungsi hakiki yaitu pelayanan (*Service*), pemberdayaan (*empowerment*), dan pembangunan (*development*), jadi selain melaksanakan pembangunan, pemerintah juga memberikan pelayanan publik.

Institusi pemerintah sebagai pelayanan masyarakat perlu menemukan dan memahami cara yang professional dalam rangka pemenuhan kebutuhan masyarakat, dan dalam konteks pemerintahan, kebutuhan masyarakat menjadi tuntutan dan tanggung jawab pemerintah. Oleh karena itu, pemerintahan perlu diselenggarakan secara dinamis, tanggap, cepat dan tepat sasaran.

Pelayanan terhadap masyarakat selama ini diupayakan oleh pemerintah selaku penyelenggara administrasi negara. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang merupakan penyempurnaan dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintahan kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi daerah yang nyata luas dan bertanggung jawab kepada daerah. Hal ini berarti fungsi pelayanan pun telah didesentralisasikan dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Perubahan paradigma diatas menuntut daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan unsur-unsur pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Pemerintah daerah dalam mengurus rumah tangga daerah dan pelayanan kepada masyarakat, kinerja pemerintah daerah melalui kapasitas Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) perlu ditingkatakan.

Sumberdaya manusia merupakan aspek yang sangat penting didalam pembangunan, disamping unsur lainnya seperti bahan, modal, dan teknologi.

Pembangunan nasional dapat tercapai dengan baik, apabila ditunjang oleh sumber daya manusia yang handal. Sumber daya manusia merupakan unsur yang sangat penting untuk tercapainya keberhasilan pembangunan.

Indonesia merupakan negara agraris sebagian besar penduduknya yang hidup di pedesaan bermata pencaharian sebagai petani, karena didukung kondisi tanah serta iklim di Indonesia para petani banyak sekali menghasilkan tanaman-tanaman yang diperlukan oleh masyarakat. Produk tersebut biasanya di ekspor untuk memenuhi kebutuhan negara-negara lain, kegiatan ekspor ini akan menghasilkan devisa. Petani memiliki keinginan untuk meningkatkan produksi pertaniannya tetapi karena banyak masalah yang dihadapinya sehingga sulit untuk mencapai apa yang diinginkannya.

Luasnya lahan pertanian dengan tanah yang subur membuat banyak masyarakat yang berprofesi sebagai seorang petani, namun taraf hidup petani di Indonesia belum maksimal. Kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat sangat berpengaruh dalam mendukung para petani di pelosok-pelosok Desa.

Pengelolaan pada sektor pertanian di Kabupaten Bandung Barat merupakan salah satu upaya yang diarahkan agar dari pertanian ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat petani. Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan petani memberi dukungan yang baik, kepada masyarakat yang menggantungkan hidupnya dari bertani akan hidup semakin layak dan makmur. Peran aktif dari setiap bagian yang dilaksanakan di dalam Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat mewujudkan cita-cita tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 201 4 tentang Pemerintahan Daerah, maka berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah dan Peraturan Bupati Bandung Barat, dan Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas Jabatan Struktural Kantor DPKP Kaupaten Bandung Barat.

Kabupaten Bandung Barat mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanakan kebijakan daerah di bidang ketahanan pangan. DPKP memiliki fungsi untuk melaksanaka tugas diantaranya, yaitu:

1. Perumusan kebijaksanaan teknis di bidang Ketahanan Pangan;
2. Pengordinasian penyusunan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan;
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang Ketahanan Pangan; dan
4. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

   (DPKP Kabupaten Bandung Barat)

Kinerja aparatur pemerintahan secara umum sering menjadi sorotan dari masyarakat.Aparatur pemerintahan dalam tugasnya selama ini, yang dipandang oleh masyarakat belum secara optimal memperlihatkan citra dan kinerja yang diharapkan berdasarkan prinsip penyelenggaraan negara dan pemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab.

Masyarakat menilai terhadap kinerja aparatur pemerintah sangat rendah. Penyebabnya dikarenakan kinerja aparatur pemerintah melenceng dari peraturan-peraturan setiap dinas. Kinerja aparatur pemerintah dapat dilihat dari kurangnya kedisiplinan, kurang adanya keterbukaan, kurang peka terhadap *social control*, kurang taat hukum dan masih banyak hal lain yang harus ditingkatkan pelayanannya.

Kabupaten Bandung Barat merupakan daerah yang memiliki potensi pertanian yang tinggi. Kabupaten Bandung Barat memililki 16 wilayah Kecamatan dan 165 wilayah Desa, salah satunya yaitu Desa Pasirlangu yang berada di Kecamatan Cisarua, potensi petani komoditas holtikultura atau petani sayur-sayuran menjadi mayoritas di Desa Pasirlangu.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut maka dapat dirumuskan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten

Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dilihat dari aspek kualitas kerja, ketepatan waktu, inisiatif, kemampuan kerja, dan komunikasi?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dari penelitian ini adalah untuk memperoleh data dan informasi mengenai kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu. Adapun tujuan dari penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui kualitas kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
2. Untuk mengetahui ketepatan waktu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
3. Untuk mengetahui inisiatif Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
4. Untuk mengetahui kemampuan kerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.
5. Untuk mengetahui komunikasi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

1.4 Kegunaan Penelitan

Adapun kegunaan dilakukannya penelitian ini, diharapkan dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terkait, diantaranya.

1. Kegunaan Teoritis

   Hasil penelitian ini secara teori diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam bidang pengembangan teori khusunya bagi Ilmu Pemerintahan, sehingga hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan literatur bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

2. Guna Praktis

   Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, memberikan informasi dan masukan bagi Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat terkait yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini instansi terkait bisa mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan terkait kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

   a. Guna Bagi Lembaga

      Penelitian ini dapat bermanfaat bagi instansi terkait yaitu Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang terdiri dari aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan (DPKP) Kabupaten Bandung Barat dan aparatur Balai Penyuluhah Pertanian Perikanan dan Kehutanan (BP3K) Kecamatan Cisarua yang menjadi objek penelitian ini, sehingga diharapkan dengan penelitian ini dapat mendapatkan solusi untuk menyelesaikan permasalahan khususnya mengenai kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

   b. Guna Bagi Peneliti

      Semoga hasil penelitian ini bisa bermanfaat bagi peneliti sendiri untuk terus melakukan penelitian-penelitian yang lain terutama mengenai kinerja Aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

c. Guna Bagi Masyarakat

Penelitian ini diharapkan bermanfaat bagi masyarakat selaku petani waluh di Desa Pasirlangu terutama mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di wilayah Desa Pasirlangu.

d. Guna Bagi Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom

Semoga penelitian ini juga dapat bermanfaat bagi Prodi Ilmu Pemerintahan Unikom agar dapat dijadikan sebagai bahan rujukan penelitian mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Unikom di waktu yang akan datang.

2. Kajian Pustaka

2.1 Ukuran Kinerja

Kinerja merupakan hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai seseorang pegawai dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan kepadanya. Ukuran dalam mengadakan pengkajian tingkat kinerja seseorang dapat diukur melalui beberapa aspe sebagai berikut:

1. Kualitas Kerja
2. Ketepatan Waktu
3. Inisiatif
4. Kemampuan
5. Komunikasi

(Sedamaryanti, 2009:51).

Ukuran Kinerja diatas sangat berpengaruh dalam pelaksanaan suatu kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan tujuan akhir dari kelompok atau organisasi tersebut. Berdasarkan ke lima aspek ukuran kinerja aparatur diatas dijelaskan bahwa:

Pertama, menurut Mitchell (1978:343) "*Qualiti of activity totality of fitru-fitru characteristics and of service of product having an in with ability to fulfill certain requirement or requirement of between the line.* Definisi tersebut dapat

diartikan bahwa kualitas kerja adalah totalitas fitru-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu atau kebutuhan yang tersirat. Adapun yang menjadi indikator dari kualitas kerja yaitu "*appearance, power durability, reliability, and aesthetic*". (Mitchell, 1978-343).

Pendapat mengenai indikator dari kualitas kerja tersebut dapat dijelaskan bahwa yang menjadi indikator kualitas kerja yaitu penampilan, kekuatan daya tahan, kehandalan, serta daya seni dalam bekerja.

Kedua, menurut Mitchell (1978:344) "*The long execution of activity to reach result which have been targeted."* Waktu kerja merupakan lama pelaksanaan kerja untuk menyelesaikan pekerjaan yang telah ditargetkan. Indikator dari waktu kerja yaitu "*Schedule, time of completion of work."* (Mitchell, 1978:344). Indikator tersebut dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan indikator waktu kerja yaitu jadwal, lama penyelesaian pekerjaan.

Ketiga, menurut . (Mitchell, 1978:344). *"Action to look for the way of quickest;fastest and easiest activity*.". Inisitaif adalah tindakan untuk mencari cara kerja yang paling mudah dan paling cepat. Adapun yang menjadi indicator dari inisiatif adalah "*Feel to wish can, feel to wish easy know,more, quicker, caring"*. (Mitchell, 1978:344). Indikator tersebut yaitu memiliki rasa ingin bisa, rasa ingin tahu lebih mudah lebih cepat, kepedulian.

Keempat, menurut (Mitchell, 1978:344) *"Ability of the job is someone readyness in working by konsepsional and is technical of operational"*. Definisi kemampuan kerja tersebut merupakan kesanggupan seseorang untuk melakukan pekerjaan secara konsepsional dan teknik operasiaonal. Kemdian yang menjadi indikator adalah *"Indicator is knowledge, attitude, and skill."* (Mitchell, 1978:345). Indikator kemampuan kerja tersebut dapat diinterpretasikan bahwa yang dimaksud dengan kemampuan kerja ditandai dengan pengetahunan, sikap, dan keterampilan.

Kelima, menurut (Mitchell, 1978:346). "*Communications of wrok is relation of work between superior with superior, superior with subordinate and subordinate*

with subordinate to facilitate activity process". Komunikasi kerja tersebut dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan komunikasi kerja adalah hubungan kerja antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan untuk memudahkan proses kerja. Kemudian yang menjadi indikator dari komunikasi kerja yaitu "*The commucation of work is comprehending each other work, cooperation, harmonious, merger of work, convert experience, and each other suggestion*. (Mitchell, 1978:346). Indikator dari komunikasi kerja merupakan saling memahami pekerjaan, kerjasama, harmonis, penggabungan pekerjaan, tukar pengalaman, dan saling memberi saran.

3. Metode Penelitian

3.1 Desain Penelitian

Desain pnelitian merupakan semua proses penelitian yang dilakukan oleh peneliti dalam melaksanakan penelitian, mulai dari perencanaan pelaksanaan penelitian dengan cara memilih data, mengumpukan data yang diteliti pada waktu tertentu. Metode yang digunakan oleh peneliti adalah metode *deskriptif* dengan pendekatan kualitatif, karena peneliti disini menggambarkan serta memaparkan secara menyeluruh keadaan, kondisi dan peristiwa dari judul peneliti yaitu: mengenai Kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat (studi tentang peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu)

4. Pembahasan

4.1 Objek Penelitian

Desa Pasirlangu adalah sebuah Desa di Kecamatan Cisarua, Kabupaten Bandung Barat. Tepatnya berada tidak jauh dari kaki Gunung Burangrang. Desa Pasirlangu memiliki 9.924 jumlah penduduk yang terdiri dari 13 rukun warga, 61 rukun tetangga, dan 10 kelompok tani. Penduduk desa ini menggantungkan hidupnya pada pertanian. Berikut tabel masyarakat Desa Pasirlangu menurut mata pencahariannya.

Tabel 4.1
Matapencaharian Masyarakat Desa Pasirlangu

No	Jenis Pekerjaan	Laki-Laki(orang)	Perempuan(orang)
1.	Petani	3.987	638
2	Buruh Tani	657	186
3	Buruh Migran	3	4
4	Pengusaha kkecil, menengah, dan besar	33	0
5	Pedagang Keliling	18	3
6	Pegawai Negeri Sipil	9	14
7	Pengrajin	5	1
8	Peternak	2	0
9	Montir	10	0
10	Karyawan Perusahaan Pemerintah	2	0

(Sumber : Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan tabel mata pencaharian masyarakat Desa Pasirlangu diatas dapat diuraikan bahwa masyarakat Desa Pasirlangu mayoritas adalah bermata pencaharian sebagai seorang petani. Komoditas pertanian yang ada di Desa ini antara lain: bunga potong, sayur mayur, waluh (lejet) dan cabai paprika. Komoditas pertanian tersebut menjadi sumber perekonomian utama di Desa Pasirlangu karena tingkat harga jual yang tinggi dibandingkan sayuran lain. Desa Pasirlangu letaknya sedikit terpencil, namun perekonomian di Desa Pasirlangu belum dapat dikatakan maju. Berikut uraian petani berdasarkan jenis tanaman di Desa Pasirlangu:

Tabel 4.2
Data Luas Lahan Petani Desa Pasirlangu

No	Nama Sayuran	Luas Tanaman Akhir Bulan Yang Lalu (Ha)	Luas Panen (Ha)		Luas Penanaman Baru/Tambah (Ha)	Luas Tanaman Akhir Bulan	Produk (kwintal)		Harga Jual Petani PerKilogram
			Habis/ Dibongkar	Belum Habis			Dipanen/Habis Dibongkar	Belum Habis	
1	Waluh	146	29	49	32	149	4.300	15.400	Rp. 4.000
2	Jamur	135	20	35	-	1301	1.550	6.000	Rp.12.000
3	Cabai Paprika	22	3	25	-	19	996	1.560	Rp. 30.000
4	Tomat	20	5	19	3	18	1.250	1.000	Rp. 5.000
5	Buncis	15	6	5	8	17	690	400	Rp. 7.000

(Sumber: Desa Pasirlangu, 2018)

Berdasarkan uraian tabel diatas bahwa Petani Waluh di Desa Pasirlangu merupakan salah satu komoditas petani memiliki luas lahan yang lebih luas dari komoditas petani lainnya, namu tidak menutup kemungkinan bahwa kesejahteraan petani waluh kurang terpandang, dengan adanya komoditi lainnya. Minimumnya pemberian bantuan maupun penyuluhan yang dirasakan petani waluh, hal tersebut yang membuat petani waluh memiliki permasalahan baik dalam hal tanaman pangan maupun dalam hal pengolahan dan pemasaran.

Pendapatan hasil panen terkadang tidak sesuai dengan pengeluaran, hal tersebut diakibatkan oleh hasil panen yang tidak terjual habis, dan kegagalan panen yang diakibatkan oleh serangan hama yang tidak teratasi dengan baik. Keuntungan yang didapatkan petani menurun , terkadang kurang untuk dijadikan modal tanam kembali.

4.2 Kualitas Kerja Aparatur dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Kualitas kerja lembaga aparatur Negara sebagai abdi masyarakat harus selalu diupayakan untuk terus ditingkatkan sehingga dapat memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat. Kualitas kerja merupakan kesesuaian antara hasil kerja dengan standar yang telah ditentukan, sebagai totalitas fitur-fitur dan karakteristik-karakteristik dari produk atau layanan yang berpengaruh pada kemampuan untuk memenuhi kebutuhan tertentu.

Kualitas dalam kinerja aparatur khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu masih terdapat beberapa kendala yang dapat membuat kegiatan ini tidak berjalan dengan efektif. Kehandalan merupakan salah satu faktor yang berkendala khususnya dalam melaksanakan pemberian penyuluhan kepada petani oleh aparatur masih belum memadai, masih terdapatnya permasalahan yang alami petani yang belum teratasi oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Sedangkan jika dilihat dari sisi kekuatan tidak ditemukan kendala yang berarti. Dari sisi kualitas sumberdaya aparatur yang dimiliki cukup berkompeten dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.3 Ketepatan Waktu Aparatur dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Ketepatan waktu aparatur merupakan hitungan atau serangkaian ketika proses dilakukan, atau merupakan lama berlangsungnya suatu kejadian. Ketepatan waktu dalam hal ini menguraikan serangkaian waktu yang terdiri dari jadwal kerja aparatur dan lama penyelesaian kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

Pelaksanaan Kegiatan khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dilihat dari proses jadwal kerja dan lama penyelesaian aparatur secara keseluruhan berjalan cukup efektif. Kera yang dilaksanakan aparatur sesuai dengan ketentuan, lama penyelesaian mampu berjalan dengan baik sehingga petani dapat menerimanya dengan baik, sehingga penyampaian sosialisasipun dapat diterima dan dipahami oleh petani waluh di Desa Pasirlangu.

4.4 Inisiatif Aparatur dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Inisiatif merupakan kesesuaian antara aktivitas yang dilakuakn dengan wewenangan dan tanggung jawab berdasarkan peraturan. Inisiatif merupakan salah satu dimensi penting dalam Kinerja, karena dengan adanya inisiatif dari para petugas maka akan diperoleh hasil kerja yang maksimal. Dalam dimensi insisiatif, terdapat tiga aspek utama yang dapat mengukur inisiatif aparatur pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kegiatan pemberian bantuan penyuluhan dan pendampingan, aspek tersebut antara lain adalah, aspek kepedulian dan tanggung jawab, yang peneliti uraikan sebagai berikut.

Hasil mengenai kinerja aparatru pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dilihat dari kepedulian dan tanggungjawab aparatur, belum berjalan dengan efektif. Kepedulian yang berupa perhatian aparatur kepada petani yang berfungsi bentuk pemberian bantuan, hal tersebut terbukti keadaan petani waluh yang tidak dapat berkembang disebabkan oleh pengetahuan yang tidak mumpuni. Serta keterbatasan sumberdaya aparatur yang membuat tanggungjawab aparatur tidak terlihat dalam pelaksanaannya.

4.5 Kemampuan Kerja Aparatur dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Kemampuan merupakan seseorang yang memiliki kecakapan atau kesanggupan untuk menjalankan sesuatu yang diwujudkan melalui tindakannya untuk meningkatkan produktivitas kerjanya. Kemampuan kerja merupakan kesanggupan petugas untuk melakukan pekerjaan secara konsepsional dan teknik operasiaonal. Kemampuan kerja dapat ditandai dengan pengetahunan dan sikap.

Pengetahuan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dalam kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu sudah optimal dan dilaksanakan sesuai dengan kemampuan aparatur dan sesuai dengan peraturan yang telah ditentukan.

Sikap maupun perhatian yang diberikan aparatur mengalami skala prioritas sehingga tidak semua kelompok tani dapat diperhatikan, permasalahan maupun keluhan petani yang belum teratasi disebabkan oleh keterbatasan sumberdaya aparatur sehingga kelompok tani tidak terlalu diperhatikan secara berkala.

4.6 Komunikasi Kerja Aparatur dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Waluh di Desa Pasirlangu

Komunikasi kerja merupakan hubungan kerja antara atasan dengan atasan, atasan dengan bawahan dan bawahan dengan bawahan untuk memudahkan proses kerja. Komunikasi dalam pelaksanaan kegiatan pemberian penyuluhan dan pendampingan guna meningkatkan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu tidak dapat dilakukan oleh hanya satu pihak atau satu unit kerja tertentu saja, karena ada yang berkepentingan dengan keberadaan petani dan pengaruhnya terhadap kondisi.

Komunikasi Kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya mengenai peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dilihat dari indikator kerjasama dan hubungan kerja. Kerjasama yang dilaksanakan oleh

aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat dapat dikatakan sudah optimal, dengan adanya kerjasama yang baik maka dibalik itu ada hubungan yang baik.

Hubungan aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu sudah optimal hal tersebut termasuk hubungan antara aparatur pemerintahan maupun hubungan antara aparatur dengan petani waluh dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara yang telah dilakukan peneliti mengenai kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kualitas kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dalam melaksanakan kegiatan guna meningkatkan kesejahteraan petani dapat di katakana sudah optimal kehandalan dan kekuatan aparatur dalam pelaksanaan kegiatan peningkatan kesejahteraan petani berjalan dengan efisien. Meskipun disisi lain masih ada permasalahan yang dialami petani belum teratasi dengan keseluruhan
2. Ketepatan waktu yang dilaksanakan oleh aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan sudah optimal. Tidak adanya hambatan mengenai pelaksanaan jadwal kerja dan lam penyelesaian dalam kegiatan penigkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu.
3. Inisiatif aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan

belum optimal, karena belum terpenuhinya kebutuhan petani waluh Desa Pasirlangu yang disebabkan oleh kurangnya perhatian aparatur terhadat petani waluh dan skala prioritas yang menjadi hambatan kebutuhan petani waluh Desa Pasirlangu.

4. Kemampuan kerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan cukup baik karena aparatur melaksanakan kegiatan sesuai dengan standar operasional prosedur dan sesuai dengan tugas dan fungsinya. Meskipun terkadang selalu berbenturan dengan keaadaan sumberdaya aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat yang tidak mencukupi kebutuhan.
5. Komunikasi aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat mengenai khususnya dalam kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu dapat dikatakan berjalan dengan baik, komunikasi yang menimbulkan hubungan antara aparatur Kabupaten dengan aparatur Kecamatan maupun komunikasi dengan kelompok tani berjalan dengan baik sehingga segala keluhan petani dapat tersampaikan dengan baik kepada aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil kesimpulan diatas mengenai kinerja aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat khususnya dalam peningkatan kesejahteraan petani waluh di Desa Pasirlangu, peneliti memiliki beberapa saran yaitu sebaagai berikut:

1. Perlu adanya memperbanyak jumlah aparatur BP3K Kecamatan Cisarua selaku petugas penyuluh pertanian untuk kegiatan pemberian bantuan, penyuluhan, karena jika jumlah aparatur petugas lapangan sesuai dengan jumlah desa yang ada di Kabupaten Bandung Barat maka khususnya masalah yang dihadapi petani waluh Desa Pasirlangu akan dapat ditangani dengan baik.
2. Perlu adanya kelengkapan sarana dan prasarana, dan perhatian lebih dari aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat kepada petani waluh Desa Pasirlangu, sehingga petani waluh Desa Pasirlangu dapat terpantau dengan baik.

3. Hendaknya aparatur Pemerintahan Kabupaten Bandung Barat selalu memperhatikan petani dengan berkala dan tidak terlalu mengacu pada skala prioritas, karena petani waluh yang harusnya mendapat prioritas yang sama dari kelompok tani lainnya.

Daftar Pustaka

Buku-Buku

Achmad S Ruky. 2001. *Sistem Manajemen Kerja, Panduan Praktis Untuk Merancang dan Meraih Kinerja Prima.* Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.

Adiwiliaga, Anwas. 1992. *Ilmu Usaha Tani.* Bandung: Cetakan II, Alumni.

Bahua, Mohamad Ikbal. 2016. *Kinerja Penyuluhan Pertanian.*Yogyakarta: Grup Penerbitan CV BUDI UTAMA.

Basri, A. F. M., dan Rivai, V.2005 *Perfomance Appraisal*. Jakarta: PT Raja, Grafindo Persada.

Bernandin, dan Russel. 1993. *Human Resource Management, New Jersey*. Prentice Hall: International Editions Upper Saddle River.

Dharma, Agus 2004.*Manajemen Supervisi*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Dwiyanto, Agus,dkk. 2006. *Reformasi Birokrasi Publik di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Hanafiah KA. 2007. *Dasar-dasar Ilmu Tanah.* Jakarta. PT. Raja Grafindo Persada.

Handayaningrat, Soewarno. 1982. *Administrasi Pemerintahan Dalam Pembangunan* Nasional. Jakarta: PT.Gunung Agung.

Ilham, Muh. 2008. *Manajemen Sumber Daya dan Kinerja Aparatur Pemerintah Daerah.* Bandung: CV Indra Prahasta.

Hasibuan S.P,Malayu. 2001. *Manajemen Sumber Daya Manusia*. Jakarta: Bumi Aksara.

Mahsun, Mohamad. 2006. *Pengukuran Kinerja Sektor Publik.* Yogyakarta : BPFE

Mangkunegara, A Prabu. 2000. *Manajemen Sumber Daya Manusia Perusahaan.* Bandung: Cetakan Kedua, PT Remaja Rosdakarya.

Mathis, R.L. dan J.H. Jackson. 2006. *Human Resource Management, Manajemen Sumber Daya Manusia* (Terjemahan Dian Angela). Jakarta: Salemba Empat.

Mitchell. 1978. *People in Organization Understanding their Behavior.* International Student Edition Mc. Graw Hill Kogakhusa, Ltd.

Moleong, Lexy. 2007. *Metodologi Penelitian Kualitatif.* Bandung: Remaja Karya.

Musanef. 1991. *Manajemen Kepegawaian Di Indonesia.* Jakarta: CV Haji Masagung.

Nawawi, Ismail. 2013. *Budaya Organisasi Kepemimpinan Dan Kinerja.*Jakarta: Prenadamedia.

Notoatmodjo, Soekidjo. 2009. *Pengembangan Sumber Daya Manusia.* Jakarta: Cetakan Keempat (EdisiRevisi), PT Rineka Cipta.

Pantjar, Simatupang. 2003. *Petanidan Permasalahan Petani.* Jakarta: Rajawali.

Prawirosentono, Suyudi. 1999. *Kebijakan Kinerja Karyawan*. Yogyakarta: BPFE.

Rambe, A. 2004. *Alokasi Pengeluaran Rumah Tanggadan Tingkat Kesejahteraan, Tesis.*Bogor: Sekolah Pascasarjana IPB.

Sandi, I Made. 1985. *Republik Indonesia Geografis Regional.*Jakarta: Depdikbud.

Sedarmayanti.2009. *Sumber Daya Manusia dan Produktivitas Kerja.* Bandung: Mandar Maju.

_____,2016. *Manajemen Sumber Daya Manusia, Reformasi Birokrasi dan Manajemen Pegawai Negara Sipil*.Bandung: PT Refika Aditama.

Soekartawi. 1986. *Ilmu Usaha Tani dan Penelitian Untuk Pengembangan Petani Kecil*, UI – Press. Jakarta.

Sugiyono, 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif.* Bandung: ALFABETA

Sumardi, Nyoman. 2016. *Reformasi Birokrasi Pemerintahan, Menuju Tata Kelola Pemeritahan Yang Baik.* Bogor: Ghalia Indonesia.

Tika, Pabundu. 2006. *Budaya Organisasi dan Peningkatan Kinerja Perusahaan.* Jakarta:Bumi Aksara.

Wibisono, Dermawan. 2006. *Manajemen Kinerja,* Erlangga.Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.

Wibowo. 2007. *Manajemen Kinerja*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.

Yudoyono, Bambang. 2001. *Otonomi Daerah.* Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.

_____, Bambang. 2003. *Otonomi Daerah, Desentralisasi dan Pengembangan SDM Aparatur Pemdadan Anggota DPRD.* Jakarta: PT. Percetakan Penebar Swadaya.

Zeithaml, Valarie A.;A.Parasuraman & Leonard L. Berry. 1990. *Delivering Quality Service: Balancing Customer Perceptions and Expectations.* New York: Thee Free Press, Macmillan Inc.

Dokumen:

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1994 tentang Pokok-pokok Kepegawaian.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah.

Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang
Kesejahteraan Sosial.

Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah.

Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Barat Nomor 03 Tahun 2012 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Lembaga Teknis Daerah.

Peraturan Bupati Bandung Barat Nomor 36 Tahun 2017 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Rincian Tugas Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.

Badan Pusat Statistik Tahun 2007 tentang
Indikator Kesejahteraan Rakyat

Rujukan Elektronik

marketeers.com/dilemma-ekspor-petani-paprika-desa-pasirlangu/ (07/04/18)

bandungbaratkab.go.id/profile/dinas-pertanian-dan-ketahanan-pangan (09/04/18)

www.pikiran-rakyat.com (09/04/18)

https://pasirlangu.weebly.com/index.html (14/04/18)

elib.unikom.ac.id (16/04/18)